

Media Cetak	Harian Fajar
Tanggal	Selasa 18 Februari 2025
Wilayah	Kabupaten Bone



Anggaran Nol, Proyek Sudah Selesai

Anggaran Nol, Proyek Sudah Selesai

BONE, FAJAR — Pembangunan di Bone bermasalah. Tanpa anggaran, proyek dipaksakan. Hal itu berujung pada utang yang membengkak kepada kontraktor.

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bone menuding pengelolaan anggaran oleh pemkab amburadul. Kebijakan yang tak terarah disebut menjadi penyebab Bone terilit utang hingga mengalami defisit anggaran.

"Tidak ada uangnya, na (proyek) sudah dikerja (oleh

kontraktor)," sesal anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bone, Andi Idris Alang, Senin, 17 Februari 2025.

Kondisi ini kian diperparah oleh pemangkasan anggaran oleh Pusat yang mana anggaran yang dipangkas ini rencana akan digunakan untuk mendorong sejumlah program pembangunan di Kabupaten Bone.

Pemangkasan anggaran oleh pusat ini seyogiannya bukan menjadi masalah besar jika saja kondisi keu-

angan pemkab sehat. Pusat tak sepenuhnya bisa disalahkan, melainkan daerah sendiri yang tak becus dalam mendorong kebijakan dan program.

Apalagi, kebijakan pusat berlaku secara menyeluruh di semua daerah tak hanya di Bone saja. "Ini, kan, yang lalu beberapa kali program yang tidak ada uangnya (pos anggaran) malah dipaksakan untuk dilakukan pelelangan (proyek)," sambungnya.

Ini kemudian menjadi tanggung jawab kabupaten yang selanjutnya menambah daftar panjang utang yang ditanggung pemkab sejak 2023.

"Terhitung Rp2,6 triliun kemarin (2024), itu kemudian menjadi utang Rp117 miliar (program fisik belum terbayarkan), maka ini menjadi tanggung jawab Kabupaten Bone," ujar Idris.

Masalah utama yang dihadapi Bone terletak pada program fisik untuk pengerjaan

jalan yang kemungkinan sulit direalisasikan pada 2025. Apalagi program jalan ini sangat diharapkan oleh masyarakat.

Laporan musrenbang, perbaikan jalan menjadi aspirasi tertinggi. Terlebih masih banyak wilayah yang mengantre untuk perbaikan jalan ini sedari puluhan tahun lalu,

"Kan ini sekitar Rp300 triliun se-Indonesia, saya rasa ini adalah sebuah pertimbangan yang matang yang dilakukan pusat. Tentu ke de-

pan pasti ada lagi kebijakan yang bisa segarkan lagi itu yang di-refocusing, pasti akan dikembalikan," tandas politisi Golkar ini.

Terkait persoalan ini, Plt Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Bone Budiono mengatakan penyesuaian anggaran akan dilakukan oleh pada pembahasan anggaran parsial mendatang. "Jadi mau tidak mau pasti terganggu program yang didorong ini," ujar Budiono. **(an/zuk)**